

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi di Indonesia yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan. Salah satu perubahan itu adalah dari sistem yang sangat sentralisasi menjadi lebih desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat demokrasi, mempercepat pembangunan, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Mardiasmo (2002) menekankan beberapa misi utama dari sistem otonomi daerah, seperti menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini sejalan dengan konsep *good governance*, di mana negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, dan menjalankan sistem peradilan yang baik serta sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan rakyat.

Good Governance merupakan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Implementasikan *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara mengacu pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan menurut Mardiasmo (2004:25).

Kinerja Pengelolaan keuangan daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya pengelolaan keuangan tersebut maka dapat menentukan keberhasilan serta mendukung untuk kelancaran suatu kegiatan.

kinerja pemerintahan yang baik sejalan dengan konsep Good Governance, yang mencakup berbagai prinsip seperti transparansi, partisipasi, pengawasan, akuntabilitas, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, kesetaraan, wawasan ke depan, dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai kinerja suatu pemerintahan. Adapun indikator dalam pengukuran kinerja yaitu masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja sektor publik memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah membantu memperbaiki kinerja Pemerintah dengan fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pelayanan publik, pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Dalam pengelolaan keuangan, tentunya diperlukan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat pencapaian dalam memberikan pelayanan publik yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Mahsun, 2014). Pengukuran kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa dapat diukur dengan konsep "Value for money". Value for money merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki visi dan misi yang hendak dicapai, namun pencapaian visi dan misi tersebut bergantung pada penerapan Prinsip-prinsip *good governance* dan Pengendalian internal yang baik dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Namun, implementasi

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan Pengendalian internal belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah, khususnya terhadap pelayanan publik. Hal ini Disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya dukungan substansi hukum, kurangnya partisipasi sosial, transparansi yang kurang memadai, akuntabilitas yang belum maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kurangnya tanggung jawab dari penyelenggara pemerintah daerah, serta mekanisme penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang belum jelas.

Faktor penghambat lainnya diketahui jumlah tidak adanya pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020 karena realisasi belanja tak terduga yang belum kuat bukti pertanggungjawabannya menjadi masalah serius. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kinerja pengelolaan keuangan yang harus segera diperbaiki. Selain itu, Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) yang tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja dengan jumlah yang signifikan juga menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Kabupaten Jember.

Diterapkannya prinsip *good governance* dan sistem Pengendalian internal bagi masalah kinerja pengelolaan keuangan diatas akan sangat bermanfaat bagi penegakan hukum, serta bermanfaat bagi kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara, pada dasarnya memiliki peran dan fungsi sebagai penegak peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, menjalankan fungsi pelayanan publik, dan merupakan penyelenggara pemerintahan (Putri, 2018). Banyak karyawan yang bekerja semauanya sendiri, tidak mempedulikan hasil pekerjaannya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, profesional dan berkompeten, pengaruh kinerja aparatur yang baik dalam menciptakan suasana aman dan nyaman karena undang-undang justru dijadikan acuan atau pedoman.

Masalah diatas menunjukan pentingnya Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan juga diperlukan Langkah-langkah yang pasti untui memastikan setiap pengeluaran dalam keuangan yang didukung oleh bukti yang

memadai, serta mencegah terjadinya persimpangan. Dengan demikian, diharapkan kinerja keuangan Pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance agar dapat meningkatk dan lebih baik.

Selain melalui good governance, kinerja aparatur pemerintah yang baik juga dapat didukung melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan implementasi SPIP yang baik, diharapkan kinerja aparatur pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dapat memberikan pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat.

Alasan Pemilihan judul tersebut karena terdapat Penelitian terdahulu yang terkait dalam judul yang serupa dengan penelitian saya dan juga terdapat masalah terkait kinerja pengelolaan keuangan. Terdapat penelitian terdahulu penerapan prinsip Good Governance terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Rino Pandhu Wibowo (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Pemerintahan Desa Banjararum. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa diterapkannya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pengendalian internal membuat kinerja Pemerintahan Desa Banjararum lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Hal ini sesuai dengan salah satu dampak positif yang terjadi apabila prinsip Good Governance diterapkan (dalam BAPPENAS, 2007) yaitu terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Karlina Ghazalah Rahman (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu **“Pengaruh**

Penerapan Prinsip *Good Governance* Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan prinsip *Good Governance* berpengaruh signifikan pada kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh signifikan pada kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah maka didapati tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh penerapan prinsip *Good Governance* berpengaruh pada kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Menjelaskan pengaruh Pengendalian Internal berpengaruh pada kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat untuk:

1. Bagi peneliti:
Bermanfaat sebagai terapan ilmu yang dituangkan selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jember.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember:
Bermanfaat sebagai tambahan literatur agar dapat berkembang dalam kinerja keuangan di kabupaten Jember dalam penerapan prinsip *good governance* dan pengendalian internal pada kinerja Pengelolaan keuangan.
3. Bagi peneliti setelahnya:

Bermanfaat sebagai tambahan referensi penelitian yang berkaitan dengan penerapan prinsip *good governance* dan pengendalian internal pada kinerja Pengelolaan keuangan dan penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.